

# Radikalisme dan Ancaman terhadap Pluralisme di Indonesia<sup>1</sup>

Angel Damayanti<sup>2</sup>

## Pendahuluan

Serangan *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) atau yang telah berubah menjadi *Islamic State* (IS) sejak tahun 2014, semakin meluas dan mengincar target-target publik. Jika sebelumnya mereka hanya menyerang daerah di sekitar Irak dan Suriah kini serangan mereka meluas hingga ke Yaman, Mesir dan Libya. Jika sebelumnya mereka hanya menyerang pemerintah dan aparat keamanan, belakangan mereka juga mulai menyerang tempat-tempat publik seperti pasar dan tempat-tempat ibadah. Pada bulan Maret lalu tercatat ISIS menyerang dua buah masjid di Yaman dan sejumlah gereja Kristen Koptik di Mesir. Ini menjadi bukti bahwa ideologi radikal ISIS menjadi ancaman bukan saja bagi pemerintah suatu negara tetapi juga umat beragama, termasuk umat Islam dan seluruh umat manusia di dunia.

Radikalisme telah menjadi masalah bersama bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Malinau - Kalimantan Utara tanggal 6-9 Maret 2015 lalu mencatat bahwa berkembangnya paham radikal menjadi salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk juga bagi umat Kristen dan umat beragama lainnya.<sup>3</sup> Bahaya yang timbul sebagai akibat radikalisme ini oleh persekutan gereja-gereja di Indonesia dianggap sama seriusnya dengan masalah-masalah lainnya yang terjadi di Indonesia seperti kemiskinan, ketidakadilan dan kerusakan lingkungan.

Apa sebenarnya radikalisme itu, bagaimana paham radikal dapat berkembang di Indonesia dan apa implikasinya bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam paper ini. Di samping itu, paper ini juga diharapkan dapat menjawab apakah radikalisme seperti yang diyakini oleh Al Qaeda dan juga ISIS akan mengancam

---

<sup>1</sup> Paper ini disampaikan dalam seminar "Bahaya ISIS: Ancaman, Tantangan, Pencegahan dan Penanggulangannya," di Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, pada hari Kamis, 7 Mei 2015.

<sup>2</sup> Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia

<sup>3</sup> "Pesan Khusus PGI bagi Indonesia" dapat diakses dari <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pesan-khusus-pgi-untuk-indonesia> diakses pada 4 Mei 2015.

kehidupan pluralisme yang telah berlangsung dengan baik di Indonesia selama ini. Lalu bagaimana pemerintah dan masyarakat menyikapi munculnya ideologi radikal di tengah-tengah bangsa ini? Semua pertanyaan itu akan diulas dalam paper ini. Di samping itu, paper ini diharapkan juga dapat memberikan penjelasan tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah berkembang luasnya ideologi radikal semacam ini.

### **Definisi Radikalisme**

Kata radikal berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar dan *radicalis* yang berarti berakar, mengakar atau memiliki akar. Itu sebabnya, tanpa ada tendensi untuk mengartikan kata ini secara negatif, beberapa kamus berbahasa Inggris mengartikan radikal sebagai sebuah upaya perubahan secara mendasar atau perubahan untuk kembali kepada akar/dasar. Kamus bahasa Inggris Cambridge misalnya, mengartikan radikal sebagai sebuah perubahan yang terjadi secara besar-besaran dan keyakinan akan perlunya perubahan besar-besaran dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun dikaitkan dengan perubahan, tidak mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan radikal karena perubahan mengakar seperti apa yang diinginkan, bagaimana cara melakukan perubahan tersebut dan apa tujuan perubahan tersebut kerap menimbulkan pemahaman yang beragam. Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup sejumlah situs internet yang dianggap radikal misalnya, tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan radikal jelas menimbulkan kontroversi tersendiri.

Agak berbeda dengan kamus Bahasa Inggris, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengaitkan kata radikalisme dengan aktivitas politik dan mengartikannya sebagai: (1) sebuah paham atau aliran yang radikal di politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan (3) sikap ekstrem di aliran politik. Namun dalam perkembangannya, radikalisme kemudian dikaitkan juga dengan agama dan perilaku radikal dari kelompok agama tertentu terhadap kelompok lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip mereka. Radikalisme memang bisa dikaitkan dengan agama dan politik, terutama jika paham ini dihubungkan dengan keinginan suatu kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan dan/atau merubah bentuk kekuasaan suatu

negara dengan cara kekerasan, di mana kelompok tersebut menggunakan simbol-simbol agama tertentu demi mencapai tujuannya dan mendapatkan manfaat dari penggunaan simbol agama tersebut.

Mengenai radikalisme dalam agama, sebagian orang menganggap bahwa ibarat uang logam, agama memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi, agama mengajarkan kebaikan dan mendatangkan rahmat dan berkat bagi umat manusia. Namun di sisi lain, agama juga memiliki daya rusak dan dapat menimbulkan kehancuran. Terkait hal ini, Peter Berger dalam tulisannya, “Religion and Global Civil Society” menyimpulkan bahwa ketika agama telah terinstitusionalisasi, maka konflik yang merusak semua sendi kehidupan manusia dapat dengan mudah terjadi.<sup>4</sup> Dengan kata lain, ketika agama tidak lagi dipandang sebagai sebuah perwujudan iman percaya dan hubungan yang hakiki antara Tuhan dengan umat ciptaan-Nya, tetapi dipandang sebagai sebuah institusi yang di dalamnya memiliki seperangkat aturan, norma dan sanksi, maka agama sangat mungkin menjadi sumber konflik, baik itu konflik antar agama maupun konflik intra agama.

Bagi para sosiolog seperti Berger dan Juergensmeyer, sama seperti nilai-nilai sosial dan tradisi dalam masyarakat, agama dapat dianggap sebagai produk dari manusia. Agama terbentuk sebagai akibat dari perilaku dan interaksi antar manusia yang tinggal di dalam satu kelompok tertentu. Agama kemudian dipandang sebagai sebuah proses dimana orang-orang hidup, tinggal dan saling berinteraksi di dalamnya. Pada satu titik tertentu dalam proses tersebut, agama yang sebelumnya merupakan produk dari manusia dan interaksinya kemudian dapat berubah fungsi menjadi alat kontrol bagi manusia itu sendiri melalui aturan-aturan yang ada. Bahkan agama dapat digunakan oleh manusia untuk mengatur dan mengendalikan sesamanya.

Di sinilah agama kemudian dianggap sebagai institusi yang mengontrol orang-orang yang ada di dalamnya. Sebagai sebuah institusi, agama kemudian juga akan melakukan berbagai cara agar dapat tetap berjalan, termasuk dengan melakukan aksi kekerasan demi mencapai tujuan dan kepentingan politik mereka. Didukung adanya pemikiran *salafi jihadisme* yang mengizinkan penggunaan kekerasan termasuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan untuk mendirikan negara berbasis

---

<sup>4</sup> Peter Berger, “Religion and Global Civil Society” in Mark Juergensmeyer (ed.), *Religion in Global Civil Society*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

agama atau syariah Islam, maka radikalisme agama bisa menjadi ancaman serius bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Pemikiran radikalisme dalam Islam bersumber salah satunya dari pemikiran Sayyid Qutb, seorang penulis sekaligus salah satu tokoh dalam kelompok *Muslim Brotherhood* di Mesir pada tahun 1950an. Sebagai seseorang yang dibesarkan dengan nilai dan tradisi Islam yang kuat dan kemudian bersekolah di Amerika Serikat, Qutb akhirnya menjadi orang yang sangat kritis terhadap nilai-nilai dan budaya Barat. Pemikiran Qutb tentang perlunya gerakan-gerakan yang dapat menegakkan syariah Islam dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan syariah, mendorong lahirnya ideologi *Salafi Jihadisme*. Pemikiran ini intinya menegaskan kewajiban umat Islam untuk mendirikan Kekhalifahan di mana Syariat Islam dapat dijalankan dan ditegakkan.<sup>5</sup>

Untuk menegakkan Kekhalifan Islam ini, Qutb juga mengizinkan penggunaan segala macam cara, termasuk cara-cara yang keras dan ekstrim.<sup>6</sup> Bahkan melalui tulisannya, Qutb juga memberikan ijin kepada seluruh umat Islam untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggapnya tidak sesuai dengan syariah Islam, walaupun para pemimpinnya itu beragama Islam.<sup>7</sup> Pemikiran Salafi Jihadisme inilah yang dipercayai oleh kelompok-kelompok radikal teroris seperti Al Qaeda dan ISIS. Kelompok-kelompok ini merasa berkewajiban menegakkan Syariah dan Kekhalifahan Islam dengan menggunakan cara apapun termasuk dengan menggulingkan pemerintahan yang *thogut* atau yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam versi kelompok mereka.

As mentioned earlier, Salafist refused to be known as Salafi Jihadists. Although both movements acknowledge that their core teaching is derived from Sayyid Qutb ideas, Salafi Jihadists view themselves more as the protector of the coming Islamic revolution. Mark Stout noted this as Qutb mentions in his book, *Milestones*, that there should be a vanguard which sets out the determination of Islamic *Sharia* and ensures

---

<sup>5</sup> Mark Stout, "In Search of Salafi Jihadist Strategic Thought: Mining the Words of the Terrorist," dalam *Studies in Conflict & Terrorism*, vol. 32, no. 10, hal. 872-892.

<sup>6</sup> William E. Shepard, "Sayyid Qutb's Doctrine of Jahiliyya" dalam *International Journal of Middle East Studies*, vol. 35, no 4, Nov, 2003, hal 521-545.

<sup>7</sup> John C. Zimmerman, "Sayyid Qutb Influence on the 11 September Attacks," dalam *Terrorism and Political Violence*, vol. 16, no. 2, 2004, hal. 222-252.

it operates along its guidelines.<sup>8</sup> Accordingly, as mentioned by Stout many Salafi Jihadists, mainly Al Qaeda's and its affiliates leaders such as Ayman al-Zawahiri, bin Laden and Abu Ubayd al-Qurashi, started to use this term to describe themselves.

Furthermore, Stout concludes that there are at least two main goals to be achieved by Salafi Jihadists. The first is to restore a Khalifah system which stretches from Spain to Indonesia, and the second is to spread Salafi Jihadism doctrine to all Moslems in the world. In order to establish Khalifah system, Qutb allows every *jahiliyyah*, which is defined as states that rejects God's authority and Islamic rules, to be fought and overthrown with extreme measures.<sup>9</sup> Consequently, as noted by Zimmerman, Qutb's ideas may provide justification, notably for Salafi Jihadists, for the toppling of all world governments that fits the *jahiliyyah* definition by a global war. This includes states that are governed by Moslems as well.<sup>10</sup>

Qutb's doctrine about *jahiliyyah* consequently led many Jihad strategists in Middle East, prior to 11 September 2001, to fight with their local government. Al Jihad in Egypt for example, implemented this doctrine and killed Anwar Sadat in 1981. However, Al Qaeda shifted the perception about enemy of Islam and proposed a new definition.<sup>11</sup> Instead of 'near enemy', which refers to the local government, they called all Moslems all over the world to fight against 'far enemy,' which refers to the United States, its Western allies and Israel. Bin Laden ultimately emphasized this on his fatwa that were published in 1996 and 1998.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mark Stout, "In Search of Salafi Jihadist Strategic Thought: Mining the Words of the Terrorist," in *Studies in Conflict & Terrorism*, vol. 32, no. 10, pp. 872-892.

<sup>9</sup> William E. Shepard, "Sayyid Qutb's Doctrine of Jahiliyya" in *International Journal of Middle East Studies*, vol. 35, no 4, Nov, 2003, pp 521-545.

<sup>10</sup> John C. Zimmerman, "Sayyid Qutb Influence on the 11 September Attacks, in *Terrorism and Political Violence*, vol. 16, no. 2, 2004, pp. 222-252.

<sup>11</sup> Steven Brooke, "Jihadist Strategic Debates Before 9/11," in *Studies in Conflict & Terrorism*, vol. 31, no. 3, pp. 201-226.

<sup>12</sup> Both fatwa can be accessed through [http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa\\_1996.html](http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1996.html) and [http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa\\_1998.html](http://www.pbs.org/newshour/terrorism/international/fatwa_1998.html)